

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelangsungan hidup sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Kendala eksternal dapat berupa kendala diluar perusahaan seperti pasar, sosial, politik dan lain-lain. Sedangkan kendala internal adalah kendala yang terjadi didalam perusahaan itu sendiri seperti kondisi keuangan, sumber daya manusia, budaya perusahaan, pengawasan internal dan lain-lain. Kendala-kendala tersebut dapat digunakan sebagai indikator untuk memprediksi apakah perusahaan mampu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*). Suatu perusahaan yang berdiri pasti memiliki tujuan untuk dapat mempertahankan kelangsungan usaha (*going concern*) perusahaan tersebut. Kelangsungan usaha suatu perusahaan akan selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan agar dapat bertahan hidup.

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan kelangsungan hidup perusahaan menjadi hal yang sangat disoroti oleh publik. Krisis ekonomi mengakibatkan banyak perusahaan bangkrut karena tidak dapat melanjutkan usahanya. Sebanyak 14 perusahaan pada tahun 1997 dan 15 perusahaan pada tahun 1998 mengeluarkan laporan audit yang disajikan secara wajar pada tahun sebelumnya, tetapi bangkrut pada tahun berikutnya (Haron, *et al*

2009). Adanya krisis ekonomi menjadi suatu fenomena yang menarik untuk diteliti.¹

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang disusul dengan krisis politik pada tahun 1997 menyebabkan keterpurukan ekonomi Indonesia. Perekonomian Indonesia mengalami perubahan yang mendasar, dimana kemampuan satuan usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*) berada pada titik yang mengkhawatirkan. Akibatnya, pada saat itu banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, baik perusahaan-perusahaan kecil maupun perusahaan-perusahaan besar.

Salah satu perusahaan yang terkena dampak dari krisis ekonomi ini adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor properti dan *real estate*. Secara umum, sejak tahun 1998, industri *real estate* di Indonesia mengalami penurunan tingkat penjualan yang signifikan karena menurunnya daya beli pelanggan, menurunnya rata-rata tingkat hunian, penghentian atau penundaan pembangunan proyek-proyek konstruksi tertentu, dan meningkatnya ketersediaan properti.

Lingkungan resiko yang merupakan dampak dari memburuknya kondisi ekonomi yang disebabkan krisis keuangan pada tahun 1997, mengakibatkan makin meningkatnya opini *Qualified Going Concern* dan *Disclaimer* untuk penugasan tahun 1998 (Praptitorini dan Januarti, 2007). Beberapa hal yang memicu masalah *going concern* pada tahun tersebut umumnya adalah perusahaan-perusahaan memiliki rasio hutang terhadap modal yang tinggi, saldo hutang jangka pendek dalam jumlah besar yang segera jatuh tempo, mengalami

¹ Khulifa Ahdizia, "*Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kondisi Keuangan Perusahaan dan Ukuran perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern*" (Jakarta: UINJ, 2011), Hal 30.

penurunan modal (*capital deficiency*) yang signifikan, kerugian keuangan (*financial losses*) yang disebabkan karena kerugian nilai tukar, menanggung beban-beban keuangan, kerugian operasional dan tidak adanya *action plans* yang jelas dari pihak manajemen (Januarti, 2000 yang dikutip Praptitorini dan Januarti, 2007).

Keberadaan entitas mencerminkan keberadaan suatu lingkungan ekonomi. Tujuan keberadaan entitas dalam jangka panjang adalah dapat mempertahankan kelangsungan hidup usahanya (*going concern*) melalui asumsi *going concern*). Kelangsungan hidup usaha selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan agar bertahan hidup. Ketika kondisi ekonomi merupakan sesuatu yang tidak pasti, para investor mengharapkan auditor memberikan *early warning* akan kegagalan keuangan perusahaan.

Going concern (kelangsungan hidup) adalah kelangsungan hidup suatu badan usaha dan merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas sehingga jika suatu entitas mengalami kondisi yang sebaliknya, entitas tersebut menjadi bermasalah (Petronela, 2004).² Asumsi *going concern* berarti suatu badan usaha yang dianggap sudah mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam waktu jangka pendek.

Menurut Linoputri (2010) masalah *going concern* ini dapat dicegah dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Ini disebabkan karena *Good Corporate Governance* berperan dalam pengelolaan sebuah perusahaan dimana perusahaan itu dijalankan dan dikendalikan. Oleh

² Thio Petronela, "*Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Opini Audit Going Concern*". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*". 2004, hal.66

karena itu salah satu manfaat dari *Good Corporate Governance* adalah menjaga *Going Concern* perusahaan.³ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) menerangkan dalam pengelolaan perusahaan yang baik, perusahaan harus mendasarkan pengelolaan perusahaan berdasar prinsip *Good Corporate Governance* antara lain transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan keadilan (*fairness*). Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance* berimplikasi terhadap kinerja perusahaan yang baik yang menyebabkan kemungkinan perusahaan mendapat opini audit *going concern* kecil. Mekanisme *corporate governance* berfungsi untuk memastikan pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau arah kebijakan yang ditetapkan. Mekanisme diarahkan untuk menjamin dan mengawasi jalannya sistem *governance* dalam suatu perusahaan.

Menurut Syakhroza (2005) mekanisme *corporate governance* terbagi menjadi dua jenis, yaitu mekanisme *corporate governance* internal dan mekanisme *corporate governance* eksternal.⁴ Menurut Gunarsih (2003), mekanisme *corporate governance* internal didesain untuk menyamakan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Sedangkan, mekanisme *corporate governance* eksternal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh pasar.

³ Linoputri, "***Pengaruh Coporate Governance terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern***" (Universitas Diponegoro, 2010)

⁴ Arum Ardianingsih, "***Analisis Mekanisme Corporate Governance Pada Pemberian Opini Audit Dengan Penjelasan Going Concern***". Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.11 No.1, 2012, hal.63

Perubahan dewan komisaris atau *Board of Commissioner* (BoC) merupakan salah satu bentuk pengukuran mekanisme *corporate governance* dalam perusahaan. Apabila perusahaan mengambil tindakan untuk melakukan perubahan dewan komisaris dalam kondisi-kondisi yang mempengaruhi *going concern*, hal tersebut akan memancing kecurigan *stakeholders* terhadap transparansi yang dilakukan perusahaan. Kurangnya penerapan transparansi yang dilakukan perusahaan dapat dijadikan salah satu pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit *going concern* pada laporan auditnya.

Petronila (2007) menyatakan bahwa perubahan dewan direksi atau *Board of Director* (BoD) berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern* oleh auditor. Penelitian tersebut konsisten dengan penelitian Parker, Peters, dan Turetsky (2005) yang menyatakan bahwa auditor memiliki kecenderungan dua kali lebih besar untuk membeikan opini audit *going concern* apabila terjadi pergantian *Chief Executive Officer* (CEO).

Faktor lain yang diproksikan dari mekanisme *corporate governance* adalah struktur kepemilikan. Menurut Januarti (2009) struktur kepemilikan dalam perusahaan yang diukur dengan kepemilikan anggota dewan dapat meningkatkan nilai perusahaan, sehingga mengurangi resiko terjadinya kesulitan keuangan. Jika kemungkinan perusahaan semakin kecil dalam mengalami kesulitan keuangan, maka akan mengurangi potensi kebangkrutan perusahaan dan perusahaan dapat terus menjaga kelangsungan usahanya.

Adanya kepemilikan saham oleh anggota dewan dapat memperkecil terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara manajemen dengan

investor. Kepemilikan manajerial erat kaitannya dengan teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan menjelaskan hubungan antara *principal* dengan *agent*, dimana *principal* adalah pihak yang menanamkan modal dan *agent* adalah manajemen atau pihak yang mengelola modal tersebut. *Agent* mendapat kepercayaan dari *principal* untuk mengelola modal yang ditanmkannya. Jika *agent* memiliki sebagian saham perusahaan, yang dalam hal ini *agent* berperan sebagai *principal*, maka akan menghilangkan konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham seperti yang dinyatakan Jensen dan Meckling (1976) bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri.

Adanya komisaris independen merupakan salah satu syarat dalam perusahaan guna mencapai *Good Corporate Governance*. Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan (Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance). Apabila komisaris independen dapat melakukan tugasnya dengan baik maka kinerja perusahaan akan meningkat. Meningkatnya kinerja perusahaan dapat mengindikasikan bahwa perusahaan dapat bertahan dalam waktu panjang dan terlepas dari masalah *going concern*.

Selain mekanisme *corporate governance*, kondisi keuangan perusahaan dapat menentukan kelangsungan hidup usaha suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan. Jika tingkat kesehatan keuangan suatu entitas rendah, maka kemungkinan entitas tersebut bangkrut dan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Ukuran perusahaan mencerminkan besar kecilnya perusahaan. Perusahaan besar umumnya lebih jarang mendapatkan opini audit *going concern* dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mudah menyelesaikan permasalahannya dibandingkan perusahaan kecil. Namun, besarnya perusahaan tidak menjamin tidak diperolehnya opini audit *going concern*. Perusahaan yang besar belum tentu selalu terlepas dari permasalahan keuangan.

Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (PSA 341). Para pemakai laporan keuangan merasa bahwa pengeluaran opini audit *going concern* ini sebagai prediksi kebangkrutan suatu perusahaan (Santosa dan Wedari, 2007).⁵ Auditor harus bertanggung jawab terhadap opini audit *going concern* yang dikeluarkannya karena akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan keuangan. Opini audit atas laporan keuangan menjadi salah satu pertimbangan yang penting bagi investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. Oleh karena itu, informasi mengenai kelangsungan hidup dari suatu perusahaan, terutama bagi perusahaan yang *go public*, merupakan informasi yang sangat

⁵ Arga Fajar Santosa, Linda Kusumaning Wedari, "*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Penerimaan Audit Going Concern*". JAAI.Vol.11. No.2, 2007, hal. 142

bernilai bagi investor, baik investor di pasar modal maupun pihak bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti ingin menguji pengaruh mekanisme *corporate governance*, kondisi keuangan perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap opini audit *going concern*. Oleh karena itu, tema yang diangkat menjadi judul dalam penelitian ini, yaitu: **“Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, kondisi keuangan perusahaan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Empiris pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”**.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Petronila (2007). Tujuan penelitian ini mengulang penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui apakah penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya atau sebaliknya. Namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Periode penelitian

Periode penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2007, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021.

2. Variabel independen

Pada penelitian sebelumnya, indikator yang digunakan dalam mekanisme *corporate governance* adalah perubahan BoC, perubahan BoD, kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP), kepemilikan anggota dewan dan risiko saham.

Sedangkan dalam penelitian ini, indikator yang digunakan dalam variabel mekanisme *corporate governance* adalah perubahan BoC, perubahan BoD, komisaris independen, dan kepemilikan anggota dewan. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti menambahkan dua variabel independen, yaitu kondisi keuangan perusahaan dan ukuran perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan diproksikan dengan rasio *leverage*, profitabilitas dan aktivitas. Komisaris independen sebelumnya diteliti oleh Linoputri (2010). Rasio *leverage*, profitabilitas, dan aktivitas sebelumnya diteliti oleh Januarti dan Fitrianasari (2008). Dan sementara itu, ukuran perusahaan sebelumnya diteliti oleh Januarti (2009).

3. Populasi dan Sampel

Pada penelitian sebelumnya, Petronila (2007) melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 2005 dengan total sampel 193 perusahaan yang dibagi dalam 12 sektor. Sedangkan dalam penelitian ini, penelitian dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak dalam sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan tahun 2017-2019.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah mekanisme *corporate governance* (perubahan BoC, perubahan BoD, komisaris independen, dan kepemilikan anggota dewan) berpengaruh terhadap opini audit *going concern*?

2. Apakah kondisi keuangan perusahaan (rasio *leverage*, profitabilitas, dan aktivitas) berpengaruh terhadap opini audit *going concern*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah peneliti uraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* (perubahan BoC, perubahan BoD, komisaris independen, dan kepemilikan anggota dewan) terhadap opini audit *going concern*.
2. Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan perusahaan (rasio *leverage*, profitabilitas, dan aktivitas) terhadap opini audit *going concern*.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap opini audit *going concern*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi yang berguna serta sebagai masukan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pengaruh *corporate governance* (perubahan BoC, perubahan BoD, komisaris independen, dan kepemilikan anggota dewan), kondisi keuangan perusahaan (rasio *leverage*, profitabilitas, dan aktivitas), dan ukuran perusahaan terhadap opini audit *going concern*.

2. Bagi auditor

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi atau masukan mengenai hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan bagi auditor dalam mengeluarkan opini audit, khususnya opini audit *going concern*.

3. Bagi investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi atau masukan mengenai faktor perusahaan memperoleh opini audit *going concern* sehingga dapat membantu investor dalam mengambil keputusan berinvestasi.

4. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan ilmu pengetahuan mengenai mekanisme *corporate governance* (perubahan BoC, perubahan BoD, komisaris independen, dan kepemilikan anggota dewan), kondisi keuangan perusahaan (rasio leverage, profitabilitas, dan aktivitas), dan ukuran perusahaan serta pengaruhnya terhadap opini audit *going concern* yang diterima perusahaan.

5. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat menggali pengetahuan yang telah peneliti peroleh selama menuntut ilmu akuntansi sehingga dapat melakukan perbandingan dengan ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan kenyataan dalam praktik yang sebenarnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan agensi sebagai suatu kontak dibawah satu atau lebih principal yang melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. *Shareholders* atau prinsipal mendelegasikan pembuatan keputusan mengenai perusahaan kepada manajer atau agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang ekonomi rasional dan semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi (Praptitorini dan Januarti, 2007).⁶

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut *nexus of contract* (Elqorni, 2009).

Menurut Eisenhardt (dalam Haris, 2011) menyatakan bahwa teori keagenan merupakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*) dengan mengabaikan kepentingan orang

⁶ Mirna Dyah Praptitorini dan Indira Januarti , “*Pengaruh Kualitas Audit, Debt Default,dan Opinion Shopping Terhadap Penerimaan Audit Going Concern*” . Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar, hal 6.

lain, (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) bahwa manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Seorang manajer akan mengambil tindakan yang lebih menguntungkan diri sendiri (*opportunistic*) dibandingkan dengan kepentingan perusahaan sehingga dapat menimbulkan konflik. Dalam hal ini, prinsipal (pemilik) menuntut akuntabilitas dari agen (manajemen) tetapi ada kemungkinan manajemen takut untuk mengungkapkan informasi yang tidak diharapkan oleh pemilik sehingga terdapat kecenderungan untuk memanipulasi laporan keuangan. Maka secara tidak langsung manajemen berusaha menyampaikan informasi sesuai dengan harapan pemilik dengan mengabaikan kelangsungan hidup perusahaan. Hal tersebut akan berdampak buruk bagi pemilik maupun perusahaan. Lebih lanjut Emirzon (2007) dalam Madinatush (2012) menyatakan salah satu penyebab masalah keagenan adalah adanya asimetri informasi.

Asimetri informasi adalah informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen yang menimbulkan kesulitan pada prinsipal dalam mengawasi tindakan-tindakan agen. Tindakan mengawasi perilaku manajemen menimbulkan *agency cost*. *Agency cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh investor sebagai konsekuensi dari pendelegasian wewenang misalnya biaya insentif dan monitoring. Untuk mengatasi konflik dalam perusahaan, maka dibutuhkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator pada hubungan antara pemilik dan manajemen dalam hal ini adalah akuntan publik (auditor). Tugas auditor disini adalah menjembatani kepentingan prinsipal (pemilik) dengan pihak agen (manajemen) dalam mengelola keuangan perusahaan. Audit yang berkualitas

meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan dan mengurangi resiko investor (Brown *et al*, 2008 dan Saputri 2012). Jasa *assurance* dilakukan oleh auditor untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan.

Mekanisme *corporate governance* juga diharapkan meminimalkan masalah keagenan yaitu dengan memberikan keyakinan kepada pihak prinsipal atas kinerja agen yang akan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka. Memastikan bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan, serta menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan. Selain itu, bagaimana para investor melakukan kontrol terhadap para manajer terhadap dana yang telah diinvestasikan.

2.1.2 Opini Audit

Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, auditor harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2011). Dalam SA Seksi 110 paragraf 01 dijelaskan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Mulyadi menyebutkan pada laporan audit bentuk pendek baku terdiri dari tiga paragraf, yaitu paragraf pengantar, paragraf lingkup, dan paragraf pendapat. Pemberian opini audit dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dengan *stakeholders*, perusahaan karena memungkinkan pihak diluar perusahaan untuk memverifikasi validitas laporan keuangan sehingga opini tersebut harus didasarkan atas pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan standar audit dan temuan auditor.⁷ Menurut Mulyadi, opini audit ada lima, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified audit opinion*), wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion report with explanatory language*), wajar dengan pengecualian (*qualified audit opinion*), pendapat tidak wajar (*adverse opinion report*), dan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion report*).⁸

Mulyadi (2009) menyatakan bahwa setiap opini dikeluarkan auditor atas dasarnya masing-masing, yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified audit opinion*), diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit, dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan.
2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion report with explanatory language*), diberikan auditor jika terdapat

⁷ Mulyadi, *Auditing buku 2*. (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 416-417

⁸ Mulyadi, **Loc. Cit.**

hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan klien.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified audit opinion*), diberikan oleh auditor jika laporan keuangan yang disajikan klien adalah wajar, namun ketika mengaudit, auditor menemukan kondisi lingkup audit dibatasi oleh klien. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor, laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, atau prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.
4. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion report*), diberikan auditor jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien.
5. Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion report*), karena auditor tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, atau karena auditor tidak independen hubungannya dengan klien.

2.1.3 Opini Audit Going Concern

Hani *et. al.* (2003) dalam Kartika (2012) mendefenisikan *going concern* adalah kelangsungan hidup suatu entitas atau badan usaha.⁹ *Going concern* disebut juga sebagai kontinuitas akuntansi yang memperkirakan suatu bisnis akan terus berlanjut dalam waktu tidak terbatas. Jika auditor berkesimpulan bahwa terdapat keraguan besar tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, tanpa memperhatikan pengungkapan dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2008).¹⁰ Dalam hal ini auditor memberikan opini audit *going concern*.

Mutchler (1984), dalam Yusnitasari dan Setiawan (2003), menunjukkan keputusan *going concern* diambil melalui proses tiga tahap sebagai berikut:

1. Identifikasi entitas dengan masalah *going concern* yang potensial.
2. Menentukan apakah entitas dengan masalah *going concern* harus menerima laporan audit tentang *going concern*.
3. Memilih diantara dua jenis laporan audit *going concern*, yaitu modifikasi laporan audit wajar tanpa syarat atau *disclaimer*.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) seksi 341 (IAI, 2011), memberikan pedoman kepada auditor tentang dampak kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap opini auditor sebagai berikut:

⁹ Hani *et. al.*, "*Going Concern Dan Opini Audit: Studi pada Perusahaan Manufaktur pada Perusahaan Perbankan di BEJ*". Simposium Nasional Akuntansi VI, 2003.

1. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu panjang, auditor harus:
 - a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
 - b. Menetapkan kemungkinan bahwa rencana tersebut secara efektif dilaksanakan.
2. Jika manajemen tidak memiliki rencana untuk mengurangi dampak negatif kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, auditor mempertimbangkan untuk memberikan pernyataan tidak memberikan pendapat.
3. Jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh auditor adalah menyimpulkan efektivitas rencana tersebut.
 - a. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut tidak efektif, auditor menyatakan tidak memberikan pendapat.
 - b. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif dan klien mengungkapkan secara memadai, maka auditor akan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

- c. Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif akan tetapi klien tidak mengungkapkan secara memadai, maka auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar.

2.1.4 Mekanisme Corporate Governance

Defenisi *corporate governance* yang dikeluarkan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (2001), yaitu:

“Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi pihak pemegang kepentingan”.¹¹

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam studi penerapan prinsip-prinsip OECD (2004) dalam peraturan Bapepam mengenai *Corporate Governance* (2006), *corporate governance* adalah:

“Corporate governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participant in the corporation such as boards, manager, shareholders, and other stakeholders and spells out the rules and procedures for making decisions corporate affair. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”.¹²

Tujuan yang dicapai dari tata kelola perusahaan adalah terciptanya *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu tata kelola perusahaan yang baik. Asas yang terkandung dalam GCG yang harus diterapkan dan dimiliki pada setiap

¹¹ FCGI, “*Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Jilid II: Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*”. Diakses dari www.fcgi.co.id 15 Januari 2021

¹² *Ibid.*

perusahaan guna mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).¹³ Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006), yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan syarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara

¹³ KNKG, "*Pedoman Good Corporate Governance Indonesia*". 2006, diakses dari www.google.com 15 januari 2021, hal 5

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan dapat mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independen (*Independency*)

Untuk dapat melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak yang ada di perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, penyelenggaraan *Good Corporate Governance*, harus didukung oleh ketersediaan:

1. Jumlah komisaris independen adalah sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris.
2. Perlunya dibentuk komite audit.
3. Perlunya dibentuk *corporate secretary*.¹⁴

Dalam penelitian ini, elemen-elemen yang terkandung dalam mekanisme *corporate governance* adalah:

1. Dewan Komisaris

¹⁴ FCGI, *Op.Cit.*

Menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melakukan *Good Corporate Governance*. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris.¹⁵ Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- b. Anggota dewan komisaris harus bertindak profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan.
- c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasehat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan sampai kepada pemberhentian sementara.

Menurut KNKG (2006), kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two board system*), yaitu dewan komisaris dan

¹⁵ Undang-Undang No. 40, "*tentang Perseroan Terbatas*", 2007. Diakses dari www.google.com 15 Januari 2021

direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing, sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*).¹⁶ Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dewan komisaris dan direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

2. Dewan Direksi

Menurut KNKG (2006), dewan direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang.¹⁷ Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama adalah setara. Tugas direktur utama adalah mengkoordinasikan kegiatan direksi. Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak independen.
- b. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

¹⁶ KNKG, *Op.Cit.*, hal 12

¹⁷ *Loc. Cit*

- c. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan atau laba dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
- d. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan direksi merupakan pihak yang terlibat dalam pengendalian penerapan *internal governance mechanism*. Hofer dan Whetten (1997) dalam Parker *et. al.* (2005), mengemukakan pandangannya bahwa manajemen adalah pihak yang mempunyai andil yang signifikan apabila perusahaan mengalami masalah. Penelitian tersebut didukung oleh Hofer (1980) dalam Petronila (2007), yang menyatakan bahwa penggantian manajemen merupakan kondisi awal yang mencerminkan suatu *turnaround* bisnis yang sukses.

3. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Task Force Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, Pedoman tentang Komisaris Independen).

Menurut peraturan Bapepam No. Kep. 29/PM/2004 tanggal 24 September 2004, Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang:

- a. Berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik,

- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik,
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik, dan
- d. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan publik.¹⁸

Adapun tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang komisaris independen adalah:

- a. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk didalamnya memantau jadwal, anggaran, dan efektivitas strategi tersebut.
- b. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
- c. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi , sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
- d. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
- e. Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.

¹⁸ Bapepam, “Studi Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 Dalam Peraturan Bapepam Mengenai Corporate Governance”. Departemen Keuangan RI, 2006. Diakses dari www.google.com 15 Januari 2021

- f. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

4. Kepemilikan Anggota Dewan

Menurut Sutojo dan Aldridge (2008) kepemilikan anggota dewan atau terkadang disebut kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus pemegang saham perusahaan. Pada laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.1.5 Kondisi Keuangan Perusahaan

Kondisi keuangan perusahaan adalah suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan sebuah perusahaan selama periode atau kurun waktu tertentu. Kondisi keuangan merupakan gambaran atas kinerja sebuah perusahaan. Media yang dapat digunakan untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan adalah laporan keuangan, karena laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan sesungguhnya (Ramadhany, 2004). Mc. Keown *et. al.* (1991) sebagaimana dikutip Ramadhany (2004) menemukan bahwa auditor hampir tidak pernah memberikan opini audit *going concern* pada perusahaan yang tidak

mengalami kesulitan keuangan.¹⁹ Carcello dan Neal (2000) menyatakan bahwa semakin buruk kondisi perusahaan maka makin besar probabilitas perusahaan menerima opini audit *going concern*.

Indikator yang tepat untuk menilai kondisi keuangan perusahaan adalah dengan menghitung rasio keuangan perusahaan. Rasio keuangan perusahaan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Hasil dari rasio keuangan ini akan terlihat bagaimana kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan (Kasmir, 2008). Rasio keuangan perusahaan yang digunakan sebagai proksi kondisi keuangan perusahaan meliputi *leverage*, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Berikut ini adalah uraian mengenai ketiga rasio tersebut:

1. Leverage

Rasio *leverage* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. *Leverage* mengacu pada jumlah pendanaan yang berasal dari hutang perusahaan kepada kreditor. Pengukuran ini berhubungan dengan keberadaan dan ketat atau tidaknya suatu persetujuan hutang (Amilin dan Indrawan, 2008).²⁰ Tingginya rasio *financial leverage* mencerminkan tingginya risiko keuangan perusahaan. Risiko keuangan perusahaan yang tinggi

¹⁹ Alexander Ramadhany, “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan Financial Distress di BEJ”. Jurnal MAKSI. Vol. 4, 2004, hal.150.

²⁰ Amilin, dan Ady Indrawan, “ Analisis Pengukuran Going Concern Perusahaan dan Opini Audit oleh KAP Big Four (Studi Pada Emiten di BEI)”. Jurnal Ekonomi. Vol.18 No.2, 2008, hal. 74.

mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan (Petronela, 2004). Pada penelitian ini, rasio *leverage* diproksikan dengan *debt to assets* (DTA). DTA menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya melalui total aktiva yang dimilikinya.

Adapun perhitungan *leverage* dengan menggunakan *debt to total assets* adalah sebagai berikut:

$$Leverage = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aktiva}}$$

2. Rasio profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Rasio profitabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi (Van Horne dan Wachowicz, 2013).

Rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *return on equity* (ROE) yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dan tingkat pengembalian ekuitasnya. Rumus untuk menghitung ROE adalah sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas disebut juga sebagai rasio efisiensi atau perputaran, mengukur secara efektif perusahaan menggunakan berbagai asetnya (Van Horne dan Wachowicz, 2013). Rasio aktivitas yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan benar-benar dapat melakukan kegiatan operasi utamanya, dengan demikian diharapkan kelangsungan usahanya dapat dipertahankan (Adityaningrum, 2012).

Rasio aktivitas terdiri dari *Total Assets Turnover* (TATO) dan *Inventory Turnover* (ITO) (Van Horne dan Wachowicz, 2007). Pada penelitian ini rasio aktivitas diproksikan dengan *Total Assets Turnover*. *Total Assets Turnover* atau perputaran modal mengukur efisiensi relatif total aset untuk menghasilkan penjualan (Van Horne dan Wachowicz, 2013). Untuk mengukur rasio aktivitas, dalam penelitian ini digunakan proksi *total asset turnover* (TATO). Adapun rumus untuk menghitung TATO adalah sebagai berikut:

$$\text{TATO} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah variabel untuk mengukur besar kecilnya perusahaan. Mutcler (1985) menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan modifikasi opini *going concern* pada perusahaan-perusahaan kecil. Hal ini dimungkinkan karena auditor mempercayai bahwa perusahaan yang lebih besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan yang lebih kecil.

Perusahaan besar lebih banyak menawarkan *fee* audit tinggi daripada yang ditawarkan oleh perusahaan yang kecil. Dalam kaitannya mengenai kehilangan *fee* audit yang signifikan tersebut, auditor dapat meragukan pengeluaran opini *going concern* pada perusahaan besar (McKeown *et. al.* 1991 dalam Ramadhany, 2004).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai opini audit *going concern* telah banyak dilakukan, dengan modifikasi, variabel yang berbeda-beda. Berikut ini adalah ringkasan penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit *going concern*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Lino Putri	2012	Pengaruh <i>corporate governance</i> terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>	Variabel Dependen: Opini audit <i>going concern</i> Variabel Independen: Kepemilikan terpusat, kepemilikan keluarga, proporsi komisaris independen, dan keberadaan komite audit.	Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan sedangkan kepemilikan terpusat, kepemilikan keluarga, proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit tidak berpengaruh signifikan
2.	Indira Januarti	2009	Analisi Pengaruh Faktor	Variabel Dependen:	<i>Debt default</i> , ukuran

			Perusahaan, Kualitas Auditor, Kepemilikan Perusahaan terhadap Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i> (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)	Opini Audit <i>Going Concern</i> Variabel Independen: Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan	perusahaan, <i>auditor client tenure</i> , opini audit tahun sebelumnya, dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i> . Kondisi keuangan, <i>audit lag</i> , <i>opinion shopping</i> , kepemilikan manajerial dan institusional tidak berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i> .
3.	Anna Indrakila	2012	Pengaruh Kualitas audit, opini audit tahun sebelumnya, ukuran perusahaan, dan kepemilikan perusahaan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> .	Variabel Dependen: Penerimaan opini audit <i>going concern</i> Variabel Independen: Kualitas audit, opini audit tahun sebelumnya, ukuran perusahaan dan kepemilikan perusahaan	Kualitas audit, opini audit tahun sebelumnya dan kepemilikan perusahaan berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> . Dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit

					<i>going concern</i>
4.	Thio Anastasia Petronila	2007	Analisis Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i>	Variabel Dependen: Opini audit <i>going concern</i> Variabel Independen: Perubahan BoC, Perubahan BoD, dan Kepemilikan Anggota Dewan	Perubahan BoC, perubahan BoD, kepemilikan anggota dewan, dan risiko saham berpengaruh signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i> sedangkan kualitas KAP tidak berpengaruh signifikan.
5.	Indira Januarti dan Ella Fitrianasari	2008	Analisis Rasio Keuangan dan Rasio Non Keuangan yang Mempengaruhi Auditor dalam Memberikan Opini Audit <i>Going Concern</i> pada <i>Auditee</i>	Variabel Dependen: Opini Audit <i>Going Concern</i> pada <i>Auditee</i> Variabel Independen: Rasio Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Rasio Aktivitas, dan Ukuran Perusahaan	Rasio likuiditas, opini audit tahun sebelumnya dan <i>audit lag</i> berpengaruh signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i> . Rasio profitabilitas, rasio aktivitas, <i>leverage</i> , pertumbuhan perusahaan, rasio nilai pasar, ukuran perusahaan, reputasi KAP, dan <i>auditor client tenure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap opini

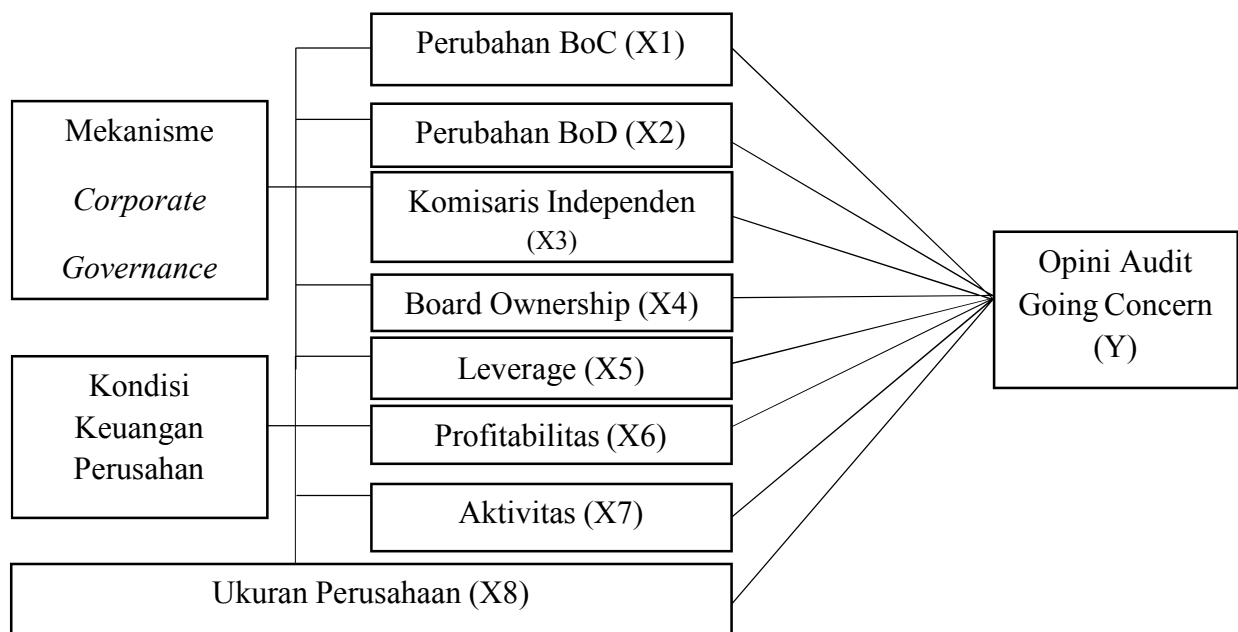
					audit <i>going concern</i> .
--	--	--	--	--	------------------------------

Sumber: Berbagai skripsi dan jurnal penelitian

2.3 Kerangka Pemikiran

Dari landasan teori yang telah diuraikan diatas, disusun hipotesis yang merupakan alur pemikiran dari penelitian ini. Kemudian digambarkan dalam kerangka pemikiran yang ditampilkan pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.1



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Hubungan Perubahan Dewan Komisaris (BoC) dengan Opini Audit Going Concern

Salah satu prinsip *corporate governance* adalah menyangkut peranan dewan komisaris sebagai salah satu komponen mekanisme *corporate governance*

internal. Dewan komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan.

Sebagai organ yang berfungsi untuk mengawasi dewan direksi dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris memegang peranan untuk menginformasikan kepada RUPS apabila terdapat indikasi-indikasi yang menyimpang dari tujuan perusahaan. Apabila perusahaan mengambil tindakan untuk melakukan perubahan dewan komisaris dalam kondisi-kondisi yang bisa mempengaruhi *going concern*. Hal tersebut akan memancing kecurigaan *stakeholders* terhadap penerapan transparansi yang dilakukan oleh perusahaan. Kurangnya penerapan transparansi dapat dijadikan salah satu pertimbangan auditor dalam memberikan opini *going concern* pada laporan auditnya.

Penelitian mengenai pengaruh perubahan BoC terhadap opini audit *going concern* dilakukan oleh Petronila (2007). Pada penelitian Petronila (2007), diperoleh hasil bahwa perubahan BoC berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern* dan memiliki nilai parameter yang positif. Hal ini berarti bahwa jika dalam suatu entitas melakukan perubahan atau penggantian BoC, maka ada kemungkinan entitas memperoleh opini audit *going concern* tinggi dibandingkan dengan tidak terdapat perubahan BoC dalam suatu entitas. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1: Perubahan dewan komisaris (BoC) berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit *going concern*.

2.4.2 Hubungan Perubahan Dewan Direksi (BoD) dengan Opini Audit *Going Concern*

Dewan direksi merupakan pihak yang terlibat dalam pengendalian penerapan *internal governance mechanism*. Hasil penelitian Petronila (2007), mengemukakan bahwa perubahan BoD berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* namun parameteranya adalah negatif. Apabila dalam suatu entitas terdapat perubahan BoD, maka kemungkinan entitas memperoleh opini audit *going concern* lebih kecil jika dalam entitas tersebut tidak terdapat perubahan BoD. Parker *et. al.* (2005) mengemukakan bahwa auditor memiliki kecenderungan dua kali lebih besar untuk memberikan opini audit *going concern* apabila terjadi penggantian *Chief Executive Officer* (CEO) atau Dewan Direksi. Dengan adanya penggantian CEO akan mengurangi kesempatan perusahaan untuk dapat bertahan selama periode kesulitan keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2: Perubahan dewan komisaris (BoD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit *going concern*.

2.4.3 Hubungan komisaris Independen dengan Opini Audit *Going Concern*

Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan asosiasi atau induk dan tidak berkaitan dengan jasa konsultasi manajemen. Ciri dari *good corporate governance* adalah adanya komisaris independen dimana mempunyai tugas menjamin transparansi, keterbukaan dalam kaitannya dengan

pelaporan keuangan serta mengatasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku.

Menurut peraturan Bursa Efek Jakarta, keanggotaan komisaris independen sekurang-kurangnya (30%) dari jumlah seluruh anggota komisaris. Oleh karena itu, dengan adanya proporsi komisaris independen minimal 30% atau lebih banyak diharapkan dapat membawa pada pelaporan keuangan yang lebih berkualitas sehingga menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian atau non opini audit *going concern*.

Proporsi keanggotaan komisaris yang besar, dapat mencegah terjadinya manipulasi yang dilakukan oleh manajemen sehingga dapat memberikan pelaporan keuangan yang memang benar-benar merepresentasikan kondisi perusahaan. Dengan demikian, semakin besar proporsi komisaris independen, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan menerima opini audit *going concern*.

Penelitian Carcello and Neal (2000) dalam Linoputri (2010), menemukan bukti bahwa semakin besar persentase komisaris independen dalam komite audit semakin rendah kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*. Hal ini sejalan dengan penelitian Petronila (2007) yang menemukan bukti bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3: Komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit *going concern*.

2.4.4 Hubungan Kepemilikan Anggota dengan Opini Audit Going Concern.

Kepemilikan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, sehingga mengurangi terjadinya kesalahan keuangan. Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga berhasil menjadi mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagenan antara manajer dengan pemilik. Adanya keselarasan antara manajer dengan pemilik, maka kelangsungan hidup perusahaan akan terjaga karena manajer dan pemilik akan berusaha bersama-sama untuk memajukan perusahaannya. Penelitian Petronila (2007) menemukan bukti bahwa ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Adanya persentase kepemilikan anggota dewan dalam perusahaan semakin besar maka anggota dewan tersebut akan berusaha meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Manajer merasa memiliki perusahaan sehingga berusaha untuk tetap dapat mempertahankan eksistensi perusahaan dan berkembang melalui peningkatan pengendalian. Dengan demikian, semakin besar proporsi kepemilikan anggota dewan maka semakin kecil kemungkinan menerima opini audit *going concern*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H4: Kepemilikan anggota dewan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit *going concern*.

2.4.5 Hubungan *Leverage* dengan Opini Audit *Going Concern*.

Rasio *leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya. Rasio *leverage* diukur dengan menggunakan *debt ratio*, yaitu dengan membandingkan total hutang dengan total aktiva. Carcello dan Neal (2000) mengemukakan bahwa *leverage* berhubungan positif dengan pemberian opini audit *going concern*. Chen dan Cruch (1992) mengemukakan bahwa suatu perusahaan yang memiliki aktiva lebih kecil dari hutangnya akan menghadapi bahaya kebangkrutan. Semakin besar *debt ratio* suatu perusahaan, maka hutang yang dimiliki suatu perusahaan akan semakin besar, sehingga resiko kegagalan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban atau hutangnya semakin tinggi. Hal ini menyebabkan perusahaan lebih berpeluang mendapatkan opini audit *going concern* serta akan menjadi pertimbangan auditor dalam penerbitan opini audit *going concern*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H5: *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit *going concern*.

2.4.6 Hubungan Profitabilitas dengan Opini Audit *Going Concern*

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan *Return On Equity* (ROE). Semakin tinggi nilai ROE, maka semakin baik prospek bisnisnya dan semakin

efektif pula pengelolaan ekuitas perusahaan sehingga auditor tidak meragukan kemampuan perusahaan untuk keberlangsungan usahanya.

Hasil penelitian Kristiana (2012) mengatakan bahwa rasio profitabilitas mempunyai pengaruh negatif. Semakin tinggi nilai rasio profitabilitas maka akan semakin kecil potensi terbitnya opini audit *going concern*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H6: Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit *going concern*.

2.4.7 Hubungan Rasio Aktivitas dengan Opini Audit *Going Concern*

Rasio aktivitas mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola aktiva yang dimiliki. Rasio aktivitas dapat diukur dengan menggunakan perputaran total aktiva atau *total asset turnover (TATO)*. Menurut Sartono (1994) dalam Lulukiyah (2011) perputaran total aktiva menunjukkan bagaimana efektivitas perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva untuk menciptakan penjualan dalam kaitannya untuk mendapatkan laba. Semakin tinggi efektivitas perusahaan menggunakan aktiva untuk memperoleh penjualan diharapkan perolehan laba perusahaan semakin baik (Lulukiyah, 2011).

Menurut Westron dan Copeland (1992) dalam Januarti (2008) bahwa harus ada kesinambungan antara penjualan dengan berbagai unsur aktiva, yaitu persediaan piutang, aktiva tetap dan aktiva lain. Rasio aktivitas yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan benar-benar dapat dipertahankan.

Penelitian yang dilakukan Ramadhany (2004) dan Rudyawan dan Badera

(2009) yang menemukan hasil bahwa rasio aktivitas berpengaruh signifikan dengan opini audit *going concern* dengan nilai parameter negatif. Hal ini berarti bahwa semakin besar rasio aktivitas perusahaan, maka kemungkinan perusahaan memperoleh opini audit *going concern* pun semakin rendah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H7: Rasio Aktivitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit *going concern*.

2.4.8 Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Opini Audit Going Concern

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor penilai apakah perusahaan berkembang dengan baik atau tidak. Perusahaan besar dianggap mampu menjalankan usahanya dengan baik, terbukti dengan kemampuan perusahaan memperluas usahanya. Hal ini terjadi tidak terlepas dari peran manajer di dalam sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan besar pasti akan melibatkan orang-orang yang ahli dibidangnya agar hasil pekerjaannya sesuai dengan apa yang diharapkan pemilik usaha.

Mutchler *et. al.* (1997) memberikan bukti empiris bahwa terdapat hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan penerimaan opini audit *going concern*. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Januarti (2009), Santosa dan Wedari (2007), Widyantari (2011) yang membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hal tersebut berarti bahwa semakin besar perusahaan maka semakin kecil

kemungkinan perusahaan tersebut memperoleh opini audit *going concern*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H8: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit *going concern*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah yang dikaji penulis, penelitian ini merupakan rancangan kausalitas, yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen, yaitu mekanisme *corporate governance*, kondisi keuangan perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen, yaitu opini audit *going concern*.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang bergerak di sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode penelitian 2017-2019. Jumlah perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019 sebanyak 64 perusahaan. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* atau metode penentuan sampel bertujuan dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu terhadap sampel penelitian.

3.2 Metode Penentuan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti (Siagian dan Sugiarto, 2002) dalam

penelitian Rudyawan dan Baldera, 2009). Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian (2017-2019).
2. Perusahaan tersebut sudah terdaftar di BEI sebelum 1 Januari 2017.
3. Menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen per 31 Desember dari tahun 2017-2019.
4. Perusahaan tidak *delisting* atau keluar dari BEI selama periode pengamatan.
5. Laporan keuangan tersebut terdapat informasi yang lengkap terkait dengan semua variabel yang diteliti.

Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam *purposive sampling* pada penelitian ini akan digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Proses Seleksi Sampel

No.	Kriteria	Pelanggaran Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan properti dan <i>real estate</i> periode 2017-2019		64
2	Terdaftar sebelum 1 Januari 2017	(16)	48
3	Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan dan laporan auditor independen pada periode yang bersangkutan	(7)	41
4	Perusahaan tidak <i>delisting</i> selama periode pengamatan	(0)	41

5	Data tidak tersedia	(5)	36
Jumlah Sampel		36	
Periode Penelitian		3	
Total Jumlah Sampel Selama Periode Penelitian		108	

3.3 Jenis, Sumber dan Teknik Pengambilan Data

3.3.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang telah tersedia. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan perusahaan, laporan auditor independen perusahaan yang umumnya terdapat pada bagian tata kelola perusahaan pada *annual report*.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan data juga diperoleh dari berbagai jurnal, skripsi terdahulu, laporan keuangan dan *annual report*. Data laporan keuangan dan *annual report* diperoleh dari *website* resmi *Indonesia Stock Exchange* yaitu www.idx.co.id.

3.3.3 Teknik Pengambilan Data

Proses pengumpulan dan penelitian ini dilakukan dengan cara mengunduh melalui *website* resmi *Indonesia Stock Exchange* yaitu www.idx.co.id. Data terkait informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dipublikasikan di BEI.

3.4 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.4.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen dinamakan pula dengan variabel yang diduga sebagai sebab (*presumed cause variable*) atau dapat juga disebut sebagai variabel yang mendahului (*antecedent variable*). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari perubahan dewan komisaris, perubahan dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan anggota dewan, rasio *leverage*, profitabilitas, aktivitas dan ukuran perusahaan. Penjelasan mengenai variabel independen tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Perubahan Dewan Komisaris

Perubahan dewan komisaris adalah adanya penggantian anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan baik bertambahnya anggota maupun berkurangnya anggota. Variabel perubahan dewan komisaris diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana jika ada pergantian dewan komisaris diberi nilai 1 dan jika tidak ada pergantian diberi nilai 0.

b. Perubahan Dewan Direksi

Perubahan dewan direksi adalah adanya penggantian anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan baik bertambahnya anggota maupun berkurangnya anggota. Variabel perubahan dewan direksi diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana jika ada pergantian dewan direksi diberi nilai 1 dan jika tidak ada pergantian diberi nilai 0.

c. Komisaris Independen

Variabel ini merupakan representasi keberadaan komisaris independen dalam susunan dewan komisaris pada perusahaan. Komisaris independen didefinisikan sebagai komisaris yang berasal luar perusahaan atau induk yang tidak berkaitan dengan jasa manajemen. Variabel ini diukur dengan menghitung persentase proporsi jumlah komisaris independen dengan dewan komisaris.

d. Kepemilikan Anggota Dewan

Kepemilikan anggota dewan dicerminkan dari persentase besarnya jumlah saham yang dimiliki oleh dewan komisaris dan dewan direksi dari total saham yang beredar. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Jika dalam perusahaan terdapat kepemilikan saham oleh anggota dewan diberi nilai 1 dan jika dalam perusahaan tidak terdapat kepemilikan saham oleh anggota dewan diberi nilai 0.

e. *Leverage*

Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban. Rasio *leverage* diukur dengan *debt to assets ratio* dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aktiva}}$$

f. Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas diukur menggunakan *return on equity* (ROE) dengan perhitungan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

g. Rasio Aktivitas

Rasio mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola aktiva yang dimiliki. Rasio aktivitas diukur dengan menggunakan *total asset turnover* (TATO) dengan perhitungan sebagai berikut:

$$TATO = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

h. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah variabel untuk mengukur seberapa besar atau kecilnya suatu entitas atau perusahaan sampel. Pengukuran variabel ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aktiva.

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel yang lain yang diduga sebagai akibat atau dapat juga disebut sebagai variabel konsekuensi (Indriantoro dan Supomo, 2009).

a. Opini Audit *Going Concern*

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini audit *going concern* (GCAO), yaitu merupakan opini audit modifikasi yang dilakukan oleh auditor akan ketidakmampuan atau ketidakpastian kelangsungan hidup suatu perusahaan. Variabel opini audit *going concern* merupakan variabel *dummy*, yaitu variabel yang bersifat kategorikal atau dikotomi (Ghozali, 2009), dimana kategori 1 untuk perusahaan dengan opini audit *going concern* (GCAO) dan 0 untuk

perusahaan dengan opini audit *non going concern* atau *non going concern audit opinion* (NGCAO).

Adapun tabel operasionalisasi dan pengukuran variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Skala Ukur Data	Sumber Data	Alat Analisis
X ₁ = Perubahan Dewan Komisaris (BoC)	Pergantian anggota dewan komisaris (BoC)	Nominal	Sekunder	Regresi Logistik Biner
X ₂ = Perubahan Dewan Direksi (BoD)	Pergantian anggota dewan direksi (BoD)	Nominal	Sekunder	Regresi Logistik Biner
X ₃ = Komisaris Independen	Persentase jumlah komisaris independen dalam dewan komisaris dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris	Rasio	Sekunder	Regresi Logistik Biner
X ₄ = Kepemilikan Anggota Dewan (Board Ownership)	Kepemilikan saham oleh BoC maupun BoD	Nominal	Sekunder	Regresi Logistik Biner
X ₅ = Leverage	<i>Debt to assets ratio</i> = Total kewajiban : total aktiva	Rasio	Sekunder	Regresi Logistik Biner
X ₆ = Rasio Profitabilitas	<i>Return on Equity</i> = Laba bersih : total ekuitas	Rasio	Sekunder	Regresi Logistik Biner

X ₇ = Rasio Aktivitas	<i>Total asset turnover</i> = Penjualan bersih : total aktiva	Rasio	Sekunder	Regresi Logistik Biner
X ₈ = Ukuran Perusahaan	Logaritma natural dan total aktiva	Rasio	Sekunder	Regresi Logistik Biner
Y= Opini Audit <i>Going Concern</i>	Opini audit <i>going concern</i> (GCAO) dan opini audit <i>non going concern</i> (NGCAO)	Nominal	Sekunder	Regresi Logistik Biner

Sumber: data diolah

3.5 Metode Analisis Data

Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis yaitu dengan menggunakan statistik deskriptif dan regresi logistik biner (*binary logistic regression*) dengan menggunakan perangkat lunak *Microsoft Excel* dan *SPSS (Statistical Package for Social Sciences)*.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan opini audit, yaitu opini audit *going concern* dan opini audit *non going concern* untuk setiap variabel independen dalam model penelitian (Ramadhany,2004). Penelitian statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dapat dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2009).

3.5.2 Analisis Inferensial

Penelitian ini menggunakan analisis inferensial untuk pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis multivariate

dengan menggunakan model regresi logistik biner, karena variabel bebasnya merupakan kombinasi antara *metric* dan *non metric* (nominal).

3.4.4.1 Menilai Model *Fit*

Analisis yang pertama dilakukan adalah menilai *overall fit* model terhadap data. Hipotesis untuk menilai *fit* adalah:

Ho: Model yang dihipotesiskan *fit* dengan data.

Ha: Model yang dihipotesiskan tidak *fit* dengan data.

Dari hipotesis ini, maka Ho harus diterima dan Ha harus ditolak agar model *fit* dengan data. Statistik yang digunakan berdasarkan fungsi *likelihood*. *Likelihood* L dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi $-2\text{Log}(2\text{LogLikelihood})$. Statistik -2LogL atau rasio χ^2 distribusi dengan *degree of freedom* n-q, q adalah jumlah parameter (Ghozali, 2009).

Output SPSS memberikan dua nilai -2LogL yaitu satu untuk model yang hanya memasukkan konstanta dan yang kedua untuk model dengan konstanta dan variabel bebas (Ghozali, 2009). Menggunakan alpha 5% atau 0,05 (Ghozali, 2009), cara menilai model *fit* ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai $-2\text{LogL} < 0,05$ maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa model *fit* dengan data.

- 2) Jika nilai $-2LogL > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti bahwa model tidak *fit* dengan data.

Adanya pengurangan nilai antara $-2LogL$ awal (*initial -2LogL function*) dengan nilai $-2LogL$ pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan *fit* dengan data (Ghozali, 2009).

3.4.4.2 Menilai Kelayakan Model Regresi

Kelayakan model regresi dilakukan menggunakan *Hosmer and Lameshow' s Goodness of Fit Test*. *Hosmer and Lameshow' s Goodness of Fit Test* menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan *fit*) (Ghozali, 2009). Jika nilai statistik *Hosmer and Lameshow' s Goodness of Fit Test* lebih besar daripada 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2009).

3.4.4.3 Koefisien Determinasi

Pengujian ini berguna untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabilitas variabel independen. Nilai *Nagelkerke R Square* bervariasi antara 1 dan 0. Semakin mendekati nilai 1 maka model dianggap semakin *goodness of fit* sedangkan jika semakin mendekati 0 maka model semakin tidak *goodness of fit* (Ghozali, 2011).

3.4.4.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian kedelapan hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik biner, yaitu variabel bebasnya merupakan kombinasi anata metrik dan nonmetrik (nominal).

Persamaan model logistik biner yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$GC = a + \beta_1\beta_0C + \beta_2\beta_0D + \beta_3Ind_Comm + \beta_4Board_Own + \beta_5Lev + \beta_6Prof + \beta_7Aktivitas + \beta_8Size + z$$

Keterangan:

GC	= Opini audit <i>going concern</i> (<i>variabel dummy</i> , 1 jika opini <i>going concern</i> , 0 jika opini <i>non going concern</i>)
a	= Konstanta
β_0C	= Perubahan dewan komisaris (<i>variabel dummy</i>)
β_0D	= Perubahan dewan direksi (<i>variabel dummy</i>)
Ind_Comm	= Persentase komisaris independen dalam susunan dewan komisaris
Board_Own	= Kepemilikan anggota dewan (<i>variabel dummy</i>)
Lev	= total kewajiban: total aktiva
Prof	= Laba bersih (<i>net income</i>)
Aktivitas	= Penjualan bersih: total aktiva
Size	= Ukuran perusahaan yang dihitung dengan logaritma natural (ln) dari total aktiva
ε	= Kesalahan residual

3.4.4.5 Estimasi Parameter dan Interpretasinya

Estimasi parameter dapat dilihat melalui koefisien regresi. Koefisien regresi dari tiap-tiap variabel yang diuji menunjukkan bentuk hubungan antara variabel. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai probabilitas (sig) dengan tingkat signifikansi (α). Apabila terlihat angka signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka koefisien regresi adalah signifikan pada tingkat 5% maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa variabel bebas

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika angka signifikansi lebih besar dari 0,05 maka berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

